

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia, banyak perusahaan maupun masyarakat yang membutuhkan pasokan sumber daya manusia maupun sumber daya alam. Tetapi sumber daya manusia maupun sumber daya alam di Indonesia di jaman sekarang sangat lah terbatas. Hal itu mengakibatkan banyak diantara perusahaan yang ada di Indonesia mengambil sumber daya manusia dari luar negeri untuk kebutuhan yang spesifik yang tidak bisa di cari di Indonesia. Begitu pula sumber daya alam di Indonesia yang kian lama menurun dan ada yang tidak bisa di perbaharui sumber daya alamnya. Contohnya saja seperti bahan baku, bahan penolong dan lain – lain yang mendukung kegiatan produksi di era globalisasi ini. Akan tetapi, sumber daya alam di Indonesia sangatlah terbatas. Maka dari itu masyarakat yang membutuhkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhannya akan mengambil sumber daya alam di luar negeri. Salah satu caranya adalah melakukan kegiatan impor.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001 : 427), impor adalah pemasukan barang dan sebagian nya dari luar negeri. Dengan adanya kegiatan impor di Indonesia, perusahaan maupun masyarakat tidak perlu khawatir akan proses kegiatan produksinya yang membutuhkan sumber daya alam yang tidak ada di Indonesia. Dalam penyaluran barang impor ini, bisa melalui pelayaran di laut atau penerbangan. Untuk kelancaran kegiatan operasional perusahaan, baik

pelayaran atau penerbangan adalah dengan cara melakukan kegiatan impor barang jadi yang dibutuhkan seperti *spare part*, mesin, dan sebagainya. Salah satu contoh perusahaan pelayaran yang terbesar di Indonesia yaitu PT. Salam Pacific Indonesia Lines. Dengan menyandang peringkat 25 (dua puluh lima) dunia menurut *Alphaliner Axsmarine*, dengan memiliki armada perkapalan lebih dari 70 kapal dengan kapasitas muat container  $\geq 53.208$  menjadikan perusahaan pelayaran dalam negeri yang membutuhkan pasokan *spare part*, mesin dan sebagainya yang dibutuhkan oleh armada perkapalan yang dimiliki oleh PT. Salam Pacific Indonesia Lines. Namun, saat melakukan kegiatan impor barang dari luar negeri, impor tersebut dikenakan pajak.

Pada umumnya pajak merupakan suatu iuran yang ditujukan kepada rakyat untuk negara yang berdasarkan oleh Undang Undang dengan tanpa mendapatkan manfaat langsung dan pajak tersebut untuk membayar pengeluaran negara. Untuk pajak dalam kegiatan impor dinamakan PPh Pasal 22. Pajak Penghasilan Pasal 22 dikenakan kepada badan-badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Menurut UU Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008, Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap Wajib Pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Jika dibandingkan dengan PPh lainnya, PPh Pasal 22 adalah PPh yang paling rumit dibandingkan dengan PPh lainnya. Dan pada umumnya, PPh Pasal 22 dikenakan terhadap perdagangan barang yang dianggap ‘menguntungkan’, sehingga baik penjual maupun pembelinya dapat menerima keuntungan dari

perdagangan tersebut. Karena itulah, PPh Pasal 22 dapat dikenakan baik saat penjualan maupun pembelian. Dalam hal ini, penting sekali melakukan perhitungan dalam melakukan impor barang guna dalam meng-efisiensi biaya dalam kegiatan impor. Adapun Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang perhitungan PPh Pasal 22 impor barang atau kegiatan usaha di bidang lain adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.10/2017.

Selain itu, ada pula yang melaporkan pajak. Sebagaimana ditentukan dalam Undang - Undang Perpajakan, Surat Pemberitahuan (SPT) mempunyai fungsi sebagai sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang. Surat pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak pemotong/pemungut, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan. Sehingga surat pemberitahuan mempunyai makna yang cukup penting bagi Wajib Pajak. Pelaporan pajak disampaikan ke KPP atau KP2KP dimana wajib pajak terdaftar.

Selain SPT, Wajib Pajak khususnya importir menyetorkan pajak terutang PPh Pasal 22 menggunakan SSP (Surat Setoran Pajak). Adapun pengertian Surat

Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Mengingat bahwa SSP sangat penting dalam pembayaran atau penyetoran pajak, maka Surat Setoran Pajak berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak bila telah disahkan oleh pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang, atau bila telah mendapatkan validasi dari pihak lain yang berwenang. SSP yang digunakan oleh Importir atau Wajib Pajak dalam rangka impor adalah Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor (SSPCP).

Penyetoran dan pelaporan pajak harus mempunyai dasar hukum yang tepat agar Wajib Pajak taat dalam melaporkan pajaknya dan tepat waktu dalam menyetorkan pajak terhutangnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010, salah satu isi peraturannya ialah batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak antara lain, PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk dan dalam hal bea masuk ditunda atau dibebaskan dan PPh Pasal 22 atas impor harus dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean impor. Akan tetapi, ini adalah sedikit gambaran mengenai tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor dan masih banyak masyarakat dan perusahaan lainnya yang tidak tahu cara menghitung, melaporkan dan menyetorkan pajak terhutang terutama PPh Pasal 22 atas kegiatan impor,

Untuk mengetahui gambaran lebih jelas mengenai permasalahan tersebut maka penulis bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian dalam bentuk Tugas Akhir dengan judul

**“TATA CARA PERHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PPh PASAL 22 ATAS KEGIATAN IMPOR BARANG PADA PT. SALAM PACIFIC INDONESIA LINES ”**

### **1.2 Tujuan Studi Lapang**

Tujuan studi lapang ini adalah menjelaskan tentang tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada PT. Salam Pacific Indonesia Lines

### **1.3 Manfaat Studi Lapang**

Selain terdapat tujuan studi lapang, didalam laporan ini juga terdapat manfaat yang bisa diberikan untuk beberapa pihak yang terkait. Pertama, perusahaan pelayaran dalam negeri atau luar negeri. Dengan penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai panduan dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang tersebut. Kedua, bagi penulis yaitu untuk mendapatkan wawasan yang lebih terkait pajak atas kegiatan impor, serta untuk menerapkan teori-teori tentang impor yang diperoleh selama duduk di bangku kuliah. Ketiga, bagi pembaca yaitu sebagai bahan referensi pembelajaran para pembaca yang ada kaitannya mengenai tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada PT. Salam Pacific Indonesia Lines

#### **1.4 Ruang Lingkup Studi Lapang**

Penulis melakukan pembatasan mengenai pembahasan masalah ini, hal ini bertujuan agar arah pembahasan ini tidak terlalu luas, maka penulis hanya membahas tentang tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada PT. Salam Pacific Indonesia Lines Kota Surabaya tahun 2019

#### **1.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utamanya adalah mendapatkan data yang akurat. Dalam memperoleh data tersebut maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Observasi, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada PT. Salam Pacific Indonesia Lines, serta mengumpulkan data-data tentang tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang di PT. Salam Pacific Indonesia Lines
2. Wawancara, merupakan cara pengumpulan data melalui tanya jawab langsung pada seorang informan (pemberi informasi). Dalam metode ini, data diperoleh dan dikumpulkan dengan melakukan sesi tanya jawab langsung dengan karyawan staf purchasing impor pada PT. Salam Pacific Indonesia Lines yang menangani tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang pada PT. Salam Pacific Indonesia Lines

3. Dokumentasi, merupakan teknik dalam pengumpulan data dengan mengumpulkan data atau dokumen – dokumen yang berkaitan tentang tata cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 22 atas kegiatan impor barang di PT. Salam Pacific Indonesia Lines, sehingga diperoleh manfaat sebagai dasar pengujian data.

